



MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 Telp. 3843348 – 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : 522/Bua.2/07/11/2017
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Permintaan kelengkapan data Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN)

-21 November 2017

Yth. Para Bapak / Ibu Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding di –

Tempat

Menyusuli surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 250/BUA/KP.03/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 hal Permintaan Data Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pendataan serta data yang telah kami peroleh melalui e-mail ***jafung@mahkamahagung.go.id*** terkait Permintaan data Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN), terdapat 5 satker Peradilan Tingkat Banding yang belum mengirimkan data penunjukan Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN) (daftar Satker Tk.Banding terlampir). Sedangkan, 41 satker Peradilan Tingkat Banding yang telah mengirimkan data melalui e-mail perlu melengkapi ulang data tambahan untuk diproses aktivasi akses user Admin Unit Kerja pada aplikasi *e-Registration* LHKPN (rincian kekurangan terlampir).
2. Guna melengkapi kekurangan data pada poin 1, dimohon kepada yang sateranya tercantum dalam lampiran surat ini untuk segera mengirim penunjukan Data Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN) melalui e-mail ***jafung@mahkamahagung.go.id*** paling lambat tanggal **27 November 2017**
3. Data yang dikirim melalui e-mail berupa format .pdf (*e-doc*) dengan melampirkan formulir permintaan data Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN), formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi E-Registration LHKPN, serta fotocopy KTP masing-masing Admin Unit kerja yang ditunjuk
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi *call center* Jabatan Fungsional pada nomor **081932608019**

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



a.n Kepala Badan Urusan Administrasi,
Kepala Biro Kepegawaian

Agus Zaim Mutaqien

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Lampiran : Surat Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
 Nomor : 552/Bua.2/07/11/2017
 Tanggal : 21 November 2017

DAFTAR SATKER YANG PERLU MELENGKAPI DATA PERMINTAAN ADMIN UNIT KERJA UNTUK SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN)

NO	NAMA SATKER	KEKURANGAN KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Data Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara elektronik (e-LHKPN)	Data yang dikirim melalui e-mail berupa e-doc dengan format .Pdf, dengan melampirkan : - Formulir permintaan data Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN); - Formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Registration LHKPN; serta - Fotocopy KTP masing-masing Admin Unit Kerja yang ditunjuk
2	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta		
3	Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat		
4	Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur		
5	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta		
6	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	Formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Registration LHKPN belum lengkap di paraf & Admin Unit Kerja yang ditunjuk belum melampirkan fotocopy KTP	Data yang dikirim melalui e-mail berupa e-doc dengan format .Pdf, dengan melampirkan : - Formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Registration LHKPN dilengkapi dengan paraf - Fotocopy KTP masing-masing Admin Unit Kerja yang ditunjuk
7	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah		
8	Pengadilan Tinggi Sumatera Utara	Formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Registration LHKPN belum dilampirkan & Admin Unit Kerja yang ditunjuk belum melampirkan fotocopy KTP	Data yang dikirim melalui e-mail berupa e-doc dengan format .Pdf, dengan melampirkan : - Formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Registration LHKPN (formulir diberi paraf & tanda tangan); serta - Fotocopy KTP masing-masing Admin Unit Kerja yang ditunjuk
9	Pengadilan Tinggi Sumatera Barat		
10	Pengadilan Tinggi Pekanbaru		
11	Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan		
12	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung		
13	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta		
14	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah		
15	Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta		

16	Pengadilan Tinggi Jawa Timur	<p>Formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Registration LHKPN belum lengkap di paraf & Admin Unit Kerja yang ditunjuk belum melampirkan fotocopy KTP</p>	<p>Data yang dikirim melalui e-mail berupa e-doc dengan format .Pdf, dengan melampirkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Registration LHKPN (formulir diberi paraf & tanda tangan); serta - Fotocopy KTP masing-masing Admin Unit Kerja yang ditunjuk
17	Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan		
18	Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat		
19	Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara		
20	Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara		
21	Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan		
22	Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung		
23	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat		
24	Pengadilan Tinggi Agama D.I. Yogyakarta		
25	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur		
26	Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah		
27	Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Utara		
28	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo		
29	Pengadilan Tinggi Agama Ambon		
30	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara		
31	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura		
32	Pengadilan Militer Tinggi Utama		
33	Pengadilan Militer Tinggi I Medan		
34	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta		
35	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya		
36	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan		
37	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya		
38	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar		

39	Pengadilan Tinggi Jawa Barat	Admin Unit Kerja yang ditunjuk belum melampirkan fotocopy KTP	Data yang dikirim melalui e-mail berupa e-doc dengan format .Pdf, dengan melampirkan : - Fotocopy KTP masing-masing Admin Unit Kerja yang ditunjuk
40	Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah		
41	Pengadilan Tinggi Pekanbaru		
42	Pengadilan Tinggi Bandar Lampung		
43	Pengadilan Tinggi Jambi	Admin Unit Kerja yang ditunjuk belum memberi paraf dan atau menandatangani isian pada Formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Registration LHKPN	Data yang dikirim melalui e-mail berupa e-doc dengan format .Pdf, dengan melampirkan : - Formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Registration LHKPN (formulir diberi paraf & tanda tangan)
44	Pengadilan Tinggi Gorontalo		
45	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat		
46	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	Admin Unit Kerja yang ditunjuk belum melampirkan Formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Registration LHKPN	Data yang dikirim melalui e-mail berupa e-doc dengan format .Pdf, dengan melampirkan : - Formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Registration LHKPN (formulir diberi paraf & tanda tangan)